

## Intisari

Penelitian ini mengkaji penerimaan dan penggunaan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah (e-Bupot IP) di kalangan instansi pemerintah Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap kepatuhan pajak. Menggunakan Model Penerimaan Teknologi (TAM) dan Teori Isomorfisme Institusional, penelitian ini mengeksplorasi faktor internal seperti Kegunaan Persepsian (*Perceived Usefulness* - PU) dan Kemudahan Penggunaan Persepsian (*Perceived Ease of Use* - PEoU), serta tekanan eksternal yang memengaruhi adopsi sistem informasi baru. Pendekatan kualitatif berlandaskan realisme kritis digunakan untuk mengategorikan instansi berdasarkan penggunaan e-Bupot IP dan kepatuhan pajak. Kategori tersebut adalah instansi menggunakan e-Bupot IP dan sepenuhnya patuh, menggunakan e-Bupot IP dan sebagian patuh, atau tidak menggunakan e-Bupot IP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi yang menggunakan e-Bupot IP memandang PU dan PeoU dengan positif. Instansi yang menggunakan e-Bupot IP dan sepenuhnya patuh berasal dari sektor keuangan. Instansi sektor keuangan lebih cenderung mengadopsi e-Bupot IP karena tekanan koersif dan norma profesional. Sementara itu, instansi yang tidak patuh menghadapi hambatan seperti keyakinan negatif, kurangnya dukungan manajemen, dan pengetahuan pajak yang tidak memadai. Studi ini memperluas model TAM dengan memasukkan faktor-faktor khusus sektor publik dan menyoroti peran tekanan institusional dalam mendorong kepatuhan. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan pelatihan teknis, penegakan peraturan, dan penguatan kolaborasi antar instansi untuk meningkatkan tata kelola pajak.

### ***Abstract***

*This study examines the acceptance and use of the e-Bupot Government Agency application (e-Bupot IP) among Indonesian government agencies, with a focus on its impact on tax compliance. Utilizing the Technology Acceptance Model (TAM) and Institutional Isomorphism Theory, the research explores internal factors such as Perceived Usefulness (PU) and Perceived Ease of Use (PEoU), as well as external pressures that influence the adoption of new information systems. A qualitative approach grounded in critical realism was used to categorize agencies based on their use of e-Bupot IP and tax compliance. The categories include agencies that fully comply with tax regulations using e-Bupot IP, those that partially comply, or those that do not use e-Bupot IP.*

*The results show that agencies using e-Bupot IP perceive PU and PEoU positively. Agencies that fully comply with tax regulations and use e-Bupot IP are predominantly from the financial sector. Financial sector agencies are more likely to adopt e-Bupot IP due to coercive pressures and professional norms. In contrast, non-compliant agencies face barriers such as negative perceptions, lack of management support, and inadequate tax knowledge. This study extends the TAM model by incorporating public sector-specific factors and highlights the role of institutional pressures in promoting compliance. Policy recommendations include enhancing technical training, enforcing regulations, and strengthening inter-agency collaboration to improve tax governance.*